



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 226/04122008
HARI : KAMIS
TANGGAL : 4 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Suram, Keamanan Pangan di Pasifik	3
	Australia Kembali Tahan Kapal Pengangkut Pencari Suaka	3
	Nelayan Indonesia Diselamatkan Kapal Berbendera Panama	4
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	SDM Berkualitas Dibutuhkan untuk Kelola Isu Luar Negeri	5
	Papuan activists storm police headquarters	5
	Presiden Minta Perempuan Aktif dalam Pemilu	5
	Hasil Survei Media Tidak Sadar Ditumpangi Kepentingan Politik	6
	B. EKONOMI	
	Indonesia Coba Ambil Alih Pasar Tekstil China	6
	Nilai ekspor CPO diduga terimbas krisis global	7
	Indonesia Penghasil Batu Bara Terbesar	7
	16.000 Buruh Sudah Di-PHK	8
	C. SOSBUD	
	Biaya Perekrutan TKI Terlalu Mahal	9
	Half of civil servants are unqualified, says minister	10

		Demand for Indonesian workers on the rise	11
	D.	HANKAM	
		Papua, Wilayah yang Penuh Ancaman	11
	E.	HUKUM	
		BHP Khianati Pancasila dan UUD 1945	12
		80 Persen UU Dituding Abaikan HAM	13
		Depkominfo Siapkan Komponen Hambat Kejahatan Maya	13
		AS Bantu Kejangung Berantas Korupsi	14
	F.	OLAHRAGA: Tidak Ada	
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Indonesia Usulkan Visi Bersama Perubahan Iklim di Forum PBB	14
	III.	ARTIKEL	
		Making ASEAN for the people	15
		Metode Alternatif Pemenangan Pemilu Oleh Affan Alamudi	16
		Politisi Indonesia dan Semangat Obama Oleh Nicolaus Uskono MSi	17
	IV.	LAIN-LAIN	
		Discourse: Government must increase spending, create more jobs, to deal with crisis	19
	V.	EDITORIAL	
		Ganti Pemimpin Lagi di Thailand	21
		Menjadi Produsen Biodiesel	21
		Babak baru Politik Thailand	23

Jakarta, 4 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Suram, Keamanan Pangan di Pasifik

Badan Dunia urusan Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan, pemanasan global yang mengakibatkan naiknya suhu air laut, meningkatnya frekuensi kejadian badai tropis, banjir, dan kekeringan, telah berdampak serius mengancam keamanan pangan di negara-negara pasifik. Laporan FAO tersebut disampaikan para delegasi dari kawasan Pasifik dalam Konferensi Perubahan Iklim di Poznan, Polandia, Selasa (2/12).

"Proyeksi iklim untuk negara-negara di pasifik semakin suram dan terindikasi mengurangi keamanan pangan, terutama untuk keperluan rumah tangga," ujar Alexander Mueller, Direktur Jenderal FAO.

Komitmen

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Yvo de Boer, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim di Poznan, mengatakan negara-negara berkembang kembali mendesak negara-negara maju untuk tetap memegang komitmen mereka dalam membantu negara miskin menghadapi dampak perubahan iklim dan menjaga hutan tropis.

Sebanyak 10,700 delegasi dari 187 negara sedang bernegosiasi untuk menyepakati sebuah perjanjian baru mengenai perubahan iklim di Copenhagen, Denmark tahun 2009 mendatang.

"Saya senang dengan kondisi yang ada saat ini. Saya kira sidang kali ini sangat penting khususnya di tengah-tengah krisis finansial global," ujarnya. (Suara Pembaruan)

2. Australia Kembali Tahan Kapal Pengangkut Pencari Suaka

Komando Pengamanan Perbatasan (BPC) Australia menangkap sebuah kapal berpenumpang 35 orang pencari suaka di perairan dekat Pulau Ashmore, barat laut negara itu, 2 Desember lalu.

Para penumpang bersama lima orang awak kapal yang belum diketahui status kewarganegaraannya itu sedang menuju Pulau Christmas untuk menjalani penahanan dan pemeriksaan, demikian informasi yang diperoleh ANTARA dari Kementerian Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia menyebutkan, Kamis.

Kapal berpenumpang 35 orang pencari suaka itu merupakan kapal ke-empat yang berhasil ditangkap pihak keamanan Australia dalam empat bulan terakhir.

Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia, Senator Chris Evans, mengatakan, para pelaku aksi penyelundupan manusia kini berupaya menghindari penangkapan aparat BPC dengan mengubah taktik mereka dan menggunakan kapal-kapal dari beragam ukuran dalam melakukan aksi mereka.

Untuk mengamankan kawasan perbatasannya dari aksi kejahatan penyelundupan manusia, BPC Australia mengerahkan kapal-kapal patroli dan melakukan lebih dari 2.400 misi penerbangan.

Sejak akhir September 2008, setidaknya sudah ada empat kapal yang berhasil ditangkap aparat keamanan negara tetangga Indonesia itu.

Pada 29 September, aparat keamanan laut Australia memergoki kapal yang dinakhodai Abdul Hamid (35), warga Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat, bersama 12 orang pencari suka asal Iran dan Afghanistan di perairan dekat Pulau Ashmore.

Sepekan kemudian, tepatnya 6 Oktober, kapal patroli laut Australia kembali menangkap satu kapal pengangkut 14 orang pencari suka asal Afghanistan lainnya dengan nakhoda yang juga orang Indonesia.

Kapal yang dinakhodai Amos Ndolo (58), warga Pulau Rote, Flores, Nusa Tenggara Timur, itu ditemukan saat sandar di sebuah fasilitas penyimpanan produk lepas pantai di perairan Laut Timor.

Kasus ini mengundang keprihatinan Perdana Menteri Kevin Rudd. Bahkan dia dilaporkan menelepon langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 8 Oktober lalu.

Daftar kasus penyelundupan manusia ke Australia bertambah panjang setelah kapal patroli angkatan lautnya menyelamatkan dua awak kapal pengangkut 10 orang pencari suka yang karam sekitar 80 mil tenggara Pulau Ashmore 19 November lalu.

Namun, status kewarganegaraan maupun asal usul kedua awak kapal yang ditahan 19 November lalu itu belum jelas, karena, seperti disampaikan Pejabat Konsul RI di Perth, Andi A. Bastari, mereka belum bisa dipastikan merupakan warga negara Indonesia sehubungan belum adanya notifikasi resmi apapun dari pihak terkait Australia.

Berdasarkan catatan Kementerian Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia, pada 2005, ada empat kapal dengan 11 orang pencari suka yang masuk negara itu. Pada 2006, jumlahnya meningkat menjadi enam kapal dengan 60 orang pencari suka, dan pada 2007, ada lima kapal dengan 148 orang penumpang.

UU Australia memberikan ancaman hukum yang berat bagi para pelaku, yakni 20 tahun penjara. (Antara)

3. Nelayan Indonesia Diselamatkan Kapal Berbendera Panama

Seorang nelayan Indonesia yang terapung di tengah laut selama lima hari berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal tanker berbendera Panama di tengah laut sekitar Laut China Selatan dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Zhanjiang, Provinsi Guangdong, China.

"Nelayan yang mengaku dari Palembang itu ditemukan mengapung di tengah laut setelah kapalnya diterjang badai hebat," kata Konjen RI di Guangzhou, Harimawan Sujitno.

Menurutnya, kapal berbendera Panama itu ketika sedang berlayar dari sebuah kota pelabuhan di Kalimantan menuju Zhanjiang dan sedang melintas di sekitar laut China Selatan, melihat nelayan yang terapung di tengah laut dan segera mengangkat dan membawanya ke kota pelabuhan di China selatan itu.

Selanjutnya ketika kapal berbendera Panama itu tiba di Zhanjiang, petugas kapal itu menelpon Konjen RI di Guangzhou untuk memberikan kabar bahwa pihaknya menemukan seorang nelayan berkebangsaan Indonesia yang terdampar di tengah laut seorang diri.

Dari hasil wawancara melalui telepon, kata Harimawan, nelayan tersebut mengaku berangkat menuju tengah laut untuk mencari ikan bersama empat orang nelayan lainnya yang masih ada hubungan saudara.

"Tapi di tengah laut kapalnya diserang badai dan karam, tapi yang berhasil ditemukan hanya seorang yang mengaku bernama Sulaiman. Sementara empat lainnya belum ditemukan," katanya.

Harimawan mengatakan, pihak Konjen RI di Guangzhou juga telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Sulaiman dan dia mengaku bahwa dirinya saat badai menerjang kapalnya sedang menangkap ikan.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikannya itu, KJRI Guangzhou juga sudah melakukan kontak melalui telepon ke keluarganya yang ada di Palembang, Sumsel, dan ternyata memang benar bahwa Sulaiman bertempat tinggal di Palembang dan ketika melaut bersama dengan empat orang yang masih ada hubungan keluarga.

Dari hasil pengakuannya melalui telepon, kondisi nelayan Indonesia itu saat ini dalam keadaan sehat dan sudah bisa berbicara dengan jelas serta mampu menceritakan peristiwa yang dialami

Dalam upaya melindungi WNI yang terkena musibah, Harimawan mengatakan bahwa KJRI Guangzhou, Kamis (4/12), akan mengirimkan dua stafnya menjemput Sulaiman di kota Zhanjiang dan selanjutnya akan membawanya ke Guangzhou.

"Kami akan memulangkan nelayan Indonesia itu ke Palembang dari Guangzhou sehingga dia bisa berkumpul kembali bersama saudaranya," katanya.

Harimawan dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada awak kapal tanker berbendera Panama yang berhasil menyelamatkan nelayan Indonesia yang terdampar di tengah laut selama lima hari itu.

"Awak kapal berbendera Panama itu sangat kooperatif dan mau membantu nelayan Indonesia. Buktinya mereka mau menelpon KJRI untuk memberitahu bahwa menemukan nelayan WNI," katanya. (Media Indonesia)

I | | .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. SDM Berkualitas Dibutuhkan untuk Kelola Isu Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengatakan perubahan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan untuk mendorong aparaturnegara yang kompeten.

"Sejak reformasi digulirkan, perubahan telah terlihat dan perlu dibangun lagi proses pengambilan langkah sekaligus tuntutan yang akuntabilitas," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/12) malam.

Ia mengatakan perubahan dalam pembibitan SDM, khususnya Deplu telah ditingkatkan terkait dengan pemerintahan yang semakin kompleks, baik politik dalam maupun luar negeri.

"Dalam kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini, rumusan untuk mencapai Indonesia yang aman, adil dan sejahtera masih perlu ditingkatkan. Pembenahan birokrasi akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan reformasi," jelasnya.

Perubahan pada bidang diplomasi, kata Hasan, telah memunculkan aktor luar negeri yang beragam dan memiliki kredibilitas yang kompeten. "Kini DPR, sipil, mass media, serta tokoh perorangan telah memiliki tokoh masing-masing yang mampu bersaing dalam globalisasi," tukasnya.

Selain itu, ia menambahkan dengan adanya SDM yang jeli, maka akan mudah menangkap isu luar negeri. "Isu nuklir Irak masih menjadi interpelasi, sehingga DPR pun tidak luput dari isu tersebut," katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar isu-isu hangat lainnya, seperti pelayanan publik, teroris, hingga konflik Palestina dan Israel perlu ditanggapi secara jeli dan intelek. "Melalui informasi yang semakin meluas sekarang ini, tidak sulit untuk mencari informasi tentang peristiwa ataupun kejadian di luar," tukasnya.

Hasan mengatakan pentingnya upaya secara sistematis untuk membangun kemitraan dengan mass media dalam mengkomunikasikan sesuatu hal penting ke luar negeri. "Ini penting agar perubahan pola berpikir dapat dikembangkan semaksimal mungkin," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Departemen Keuangan Negara Mulyana B Nasution menuturkan penataan SDM perlu dilakukan pada organisasi dan kejawatan sehingga mampu meningkatkan kinerja secara maksimal. "Dengan adanya peningkatan, maka akan mencerminkan pembaharuan dalam setiap sektor," pungkasnya. (Media Indonesia)

2. Papuan activists storm police headquarters

Some 50 Papuan human rights activists staged a rally outside Papua Provincial Police headquarters on Wednesday, demanding the release of pro-independence leader Buchtar Tabuni.

Police arrested Buchtar for organizing an Oct. 16 rally demanding Papua's independence.

"Buchtar violates Articles 106 and 110 of the Criminal Code as well as Articles 160, 212 and 216 for sedition, agitating the crowd and resisting officers," said Papua Police Chief of Detectives Sr. Comr. Paulus Waterpauw.

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

However, rally organizer Victor Yeimo said the protesters also demanded independence, challenging the police to arrest them as well.

"Buchtar is not the only separatist demanding independence. We all demand independence, so arrest us," he said.

The protesters maintained their presence in front of the police headquarters as late as 7 p.m. local time causing no disturbances to residents' activities. (The Jakarta Post)

3. Presiden Minta Perempuan Aktif dalam Pemilu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak kaum perempuan aktif dalam setiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009

Kaum perempuan diminta supaya tidak pasif dan hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Kaum ibu memiliki kekuatan moral dan sosial dalam proses demokrasi di Indonesia, teruslah berpartisipasi jangan hanya pasif, menjadi penonton," kata Presiden saat Presiden saat membuka Kongres XXII di Persatuan Wanita Indonesia (Perwari) di Istana Negara, Kamis (4/12).

Kaum perempuan, ujar Presiden, juga diminta untuk terus menumbuhkan kesadaran untuk masyarakat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dilaksanakan dengan damai dan santun."kalau ada apa-apa selesaikan dengan damai, jangan timbulkan kekerasan," kata Yudhoyono.

Ketua Umum Perwari Setiaty Hanky menyatakan anggota Perwari tidak hanya aktif di kegiatan sosial masyarakat, namun juga sejumlah kader Perwari telah berhasil menjadi anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. "Kami juga akan membantu mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu 2009," kata Setiaty. (Tempo Interaktif)

4. Hasil Survei Media Tidak Sadar Ditumpangi Kepentingan Politik

Media massa tidak sadar telah ditumpangi kepentingan politik tertentu menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Media banyak memberitakan hasil survei tentang kepartaian dan ketokohan seseorang, namun tidak disertai dengan verifikasi donatur maupun pihak-pihak di belakang lembaga survei.

Padahal, media memiliki tugas penting untuk memberikan pendidikan pada rakyat. Pendapat tersebut disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Triyono Lukmantoro ketika dihubungi SH, Rabu (3/12), menanggapi imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar rakyat berhati-hati dalam melihat hasil survei.

"Survei itu umumnya dilakukan di perkotaan, tetapi efeknya bisa sampai ke pedesaan karena penyebarannya lewat media massa, khususnya elektronik. Ia bisa menjadi mesin politik, tapi masalahnya, media tidak pernah menelusuri. Media hanya mengekspos, padahal tanpa sadar sudah masuk menjadi alat kampanye," katanya. (Sinar Harapan)

B. EKONOMI

:

1. Indonesia Coba Ambil Alih Pasar Tekstil China

Indonesia berusaha bersaing dengan China untuk mengisi pasar Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu usai menghadiri acara pembekalan Presiden kepada peserta kongres Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, mengatakan nilai ekspor tekstil Indonesia pada 2009 belum tentu menurun karena ada pengalihan permintaan dari China ke Indonesia.

Menurut Mari, saat ini sudah ada minat relokasi produksi dan sumber membeli barang dari China ke Indonesia dan Vietnam karena kondisi perekonomian dan tenaga kerja di China.

"Kita potensi bersaing dengan China, tapi tetap harus ada upayanya," ujarnya.

Mari menjelaskan, saat ini mata uang China cenderung menguat, sedangkan rupiah melemah sehingga membuka kemungkinan persaingan.

Selain itu, Mendag menambahkan, sebelum terjadinya krisis keuangan global pun ongkos tenaga kerja di China sudah naik dan ada masalah peraturan tenaga kerja yang dianggap menyulitkan.

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

"Sehingga, sudah banyak minat relokasi dari China ke tempat lain untuk produksi maupun sumber untuk membeli barangnya. Itu larinya ke Indonesia dan Vietnam. Jadi, ini peluang," tutur Mari.

Mendag menambahkan, Indonesia sudah berpromosi untuk meraih peluang tersebut.

Pasar TPT yang mungkin diambilalih Indonesia dari China, menurut Mari, adalah pasar terbuka di Jepang yang bea masuknya nol persen.

Selain itu, meski permintaan TPT di AS dan Eropa menurun, Mari mengatakan, pasar yang tadinya diisi oleh China itu masih dapat diraih oleh Indonesia.

Menanggapi proyeksi Bank Dunia tentang penurunan perdagangan internasional pada 2009, Mendag menjelaskan pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi hal tersebut.

"Paruh pertama 2009 itu pasti berat untuk semua negara, termasuk Indonesia. Saya belum bisa mengeluarkan angka dampak penurunan ekspor tahun depan, kami internal pemerintah masih rapat terus untuk melakukan revisi," katanya. (Antara)

2. Nilai ekspor CPO diduga terimbas krisis global

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memperkirakan nilai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) akan terkena imbas krisis keuangan global, meski volume eksportnya mengalami peningkatan.

"Volume [ekspor] masih bisa stabil atau sedikit pertumbuhannya, namun harga yang masih menjadi tanda tanya. Itu yang masih belum kami ketahui," ujarnya se usai menghadiri pembukaan Kongres Perwari di Istana Negara, siang tadi.

Sepanjang 2008, ujarnya, harga rata-rata CPO dunia mencapai US\$600-US\$700 per ton atau naik dibandingkan dengan rata-rata 2007 sebesar US\$632 per ton. Angka ini juga lebih baik dibandingkan dengan 2005 yang mencapai US\$520 per ton.

Ekspor minyak sawit mentah, menurut Mari, masih dapat tumbuh terutama untuk tujuan ekspor terbesar, yaitu India dan China. Pertumbuhan jumlah penduduk di kedua negara tersebut menjadi faktor penyebab dari peningkatan ekspor CPO.

Pemerintah, lanjutnya, akan mencoba membidik pasar Rusia dan Timur Tengah.

"Kami harus tetap cari pasar yang baru. India, China masih ada pertumbuhan, tapi Amerika [Serikat] dan Eropa kan turun. Kami harus cari pasar yang baru, apa itu Rusia atau Timur Tengah untuk mengisi turunnya pasar Eropa. Kami harus mulai [penjajakan ke pasar baru], harus benar-benar mulai," tegasnya. (Bisnis Indonesia)

3. Indonesia Penghasil Batu Bara Terbesar

Indonesia dan Australia hingga saat ini masih menjadi negara penghasil batu bara terbesar di kawasan Asia Pasifik, demikian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, Kamis (4/12).

Dalam sambutannya pada acara peresmian "Upgraded Brown Coal (UBC) Demonstratin Plant" di lingkungan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan, menteri mengatakan, di masa akan datang ada Tiga Proyek besar yang digarap Indonesia guna mengembangkan pengolahan batu bara yakni Coal Faction, Coal Gasifaction dan UBC.

UBC merupakan pabrik yang berfungsi meningkatkan kualitas batubara dari peringkat rendah menjadi batu bara yang memiliki sifat sama dengan peringkat lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan energi dunia, mengingat mayoritas batu bara yang dimiliki Indonesia masih peringkat kalori rendah.

Teknologi UBC diharapkan bisa mampu menghasilkan batubara bersih yang dapat menjaga kestabilan kebutuhan pasokan energi. Batu bara hasil proses dengan nilai kalori tinggi serta kadar air dan polusi rendah sangat cocok digunakan untuk keperluan dalam dan luar negeri (ekspor).

Pengoperasian teknologi UBC di lingkungan Kecamatan Satui dimaksudkan sebagai contoh pabrik UBC yang pertama dilakukan di Indonesia bahkan di dunia. Jika nanti secara teknis mampu berkembang dengan baik maka dalam jangka panjang akan mulai dikembangkan sebagai pabrik komersial.

Pabrik percontohan UBC dengan kapasitas peringkat rendah 1.000 ton per hari merupakan umpan untuk menghasilkan batubara peringkat tinggi dengan kapasitas 700 ton per hari.

Namun, dengan pabrik yang ekonomis nantinya diharapkan mampu menghasilkan batubara peringkat tinggi dengan kapasitas minimal 5.000 ton per hari.

Fasilitas pabrik UBC dibangun di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dengan pertimbangan bahwa contoh Batubara yang pernah diuji pada skala Pilot di Palimanan, berasal dari wilayah kerja PT Arutmin, di mana bersedia menyediakan lokasi.

Pabrik percontohan UBC digunakan sebagai sarana penelitian, pengembangan, dan juga sebagai sarana pelatihan bagi para operator baru. Produk pabrik percontohan UBC juga akan digunakan untuk uji karakteristik batu bara hasil proses UBC, termasuk uji pembakaran yang menggunakan boiler baik yang ada di Jepang maupun di Indonesia, tepatnya di PLTU Suralaya dan Tarahan.

Komitmen dari demonstran atau peresmian ini agar pihak pemerintah daerah bersama masyarakat bisa turut berpartisipasi memelihara keberadaan UBC. Agar dalam sistem pengoperasiannya nanti dapat memberi peluang tenaga kerja yang lebih besar bagi masyarakat.

"Cita-cita kami akhir 2009 pabrik percontohan UBC sudah menjadi komersial. Sehingga pada 2010, kondisinya lebih besar lima kali lipat dari pabrik yang ada sekarang," tegas Purnomo.

Turut hadir acara peresmian itu Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Kojiro Shio Jiki, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, Kajari Batulicin, I Made Suarnawan dan Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Irianto. (Kompas)

4. **16.000 Buruh Sudah Di-PHK**

Dampak krisis keuangan global terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia semakin nyata. Lebih dari 16.000 buruh di berbagai sektor industri telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau bicara dampak krisis, siapa yang bisa prediksi? Tapi jujur, kita sudah terdampak. Konsekuensi dari dunia usaha yang mulai kekurangan order telah mendorong pemangkasannya pekerja," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manakertrans) Erman Suparno saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR Jakarta kemarin. Berdasarkan laporan tim monitoring Depnakertrans, belasan ribu buruh yang menjadi korban PHK berasal dari berbagai bidang usaha seperti industri perikanan, elektronik, dan garmen.

Kinerja sektor-sektor tersebut langsung terimbas krisis global lantaran permintaan pasarnya melemah. Laporan itu menunjukkan, per 28 November 2008, jumlah buruh yang telah di-PHK mencapai 16.988 orang. Pada saat yang sama, sebanyak 6.597 buruh telah dirumahkan, 23.927 orang buruh dalam rencana PHK, dan 19.091 orang buruh direncanakan untuk dirumahkan.

Berdasarkan lokasinya, jumlah PHK terbanyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang menimpa 14.268 buruh. Selanjutnya di Jawa Tengah 1.190 buruh, Maluku 515 buruh, Kalimantan Barat 496 buruh, Riau 407 buruh, dan Sumatera Selatan 112 orang buruh. Jumlah buruh yang terkena PHK di DKI Jakarta bisa bertambah lantaran 9.757 buruh telah masuk daftar rencana PHK.

Pada saat yang sama, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 10.000 buruh yang telah direncanakan untuk di-PHK. Di Kalimantan Timur, jumlah buruh yang telah dirumahkan mencapai 1.890 orang. Lalu di Banten sebanyak 1.597 buruh, Jawa Tengah 1.025 buruh, Riau 1.000 buruh, Jawa Barat 600 buruh, dan Kalimantan Barat 485 buruh. Angka PHK diyakini akan terus meningkat lantaran sejumlah kasus di beberapa daerah belum termuat dalam data tim monitoring Depnakertrans.

Semisal di Provinsi Banten dilaporkan terdapat 353 Industri yang telah melakukan PHK terhadap 3.968 orang buruh. Erman mengatakan, demi mengatasi kemungkinan lonjakan PHK, pemerintah berencana merealisasi rencana aksi pada tiga aspek.

Rencana ini ditujukan tidak hanya untuk menolong buruh yang telah di-PHK, melainkan juga meminimalkan angka PHK. Aspek pertama, pemerintah siap melibatkan buruh yang telah di-PHK dalam berbagai skema program padat karya dan produktif seperti wiraswasta, bekerja di luar negeri, transmigrasi, pemanfaatan lahan, pembangunan rumah, irigasi, dan jalan raya

Aspek kedua, untuk menyelamatkan buruh yang masih dalam ancaman PHK atau dirumahkan, pemerintah bakal mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi, mengurangi lembur, menawarkan opsi pensiun dini, dan merumahkan sementara

buruh. Aspek terakhir, pemerintah juga akan mendorong optimalisasi program di berbagai kementerian/ lembaga yang banyak menyerap tenaga kerja.

Di bagian lain, kalangan dunia usaha memprediksi ancaman PHK pada tahun depan akan semakin terasa. Dampak krisis yang tahun ini hanya memukul sebagian sektor industri, pada tahun depan diperkirakan akan merembet ke sektor lain. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Ade Sudrajat mengatakan, hingga saat ini saja sudah ada 26.000 karyawan yang dirumahkan. Jumlah ini diperkirakan meningkat pada 2009. Ade yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jabar memprediksi, pada awal 2009 sekitar 10% dari total tenaga kerja di Jabar atau sekitar 70.000 orang terancam PHK.

"Sekarang sudah bukan ancaman lagi tapi memang kenyataan. PHK sudah terjadi dan pasti akan membesar pada tahun depan," tandas Ade. Jabar merupakan sentra industri tekstil utama di Indonesia. Di wilayah ini, terdapat lebih dari 700 pabrik tekstil dan menyerap sekitar 700.000 tenaga kerja. Ekspor terbesar industri TPT Jabar adalah ke Amerika Serikat.

Industri Rumah Tangga

Di tempat terpisah, ekonom yang juga anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo meminta pemerintah mengembangkan industri rumah tangga (home industry) sebagai antisipasi maraknya PHK. Industri rumah tangga diharapkan bisa menjadi bantalan kuat bagi perekonomian.

"Pemerintah perlu memberikan insentif, terutama sisi regulasi, demi pengembangan industri rumah tangga,"ujarnya. Dia menilai sampai saat ini banyak hambatan yang membuat industri rumahan sulit berkembang. Hambatan antara lain terkait perizinan usaha.

"Sekarang ini kalau mau membuat izin harus masuk ke Depdag, kadang ada izin khusus. Untuk peraturan ini saja biayanya sekitar 15%. Karena itu, pangkas aturan yang tidak perlu," katanya. Menurut dia, industri rumahan merupakan alternatif yang fleksibel dan tidak kompleks. Lantaran dikelola secara kekeluargaan, para pekerja rumahan ini akan lebih mudah menyesuaikan.

"Mereka bisa masuk dan keluar tanpa banyak keributan, berbeda dengan industri besar yang akan membuat keguncangan ketika PHK," katanya. Selain itu, menurut dia, pemerintah sudah saatnya membangun kembali industri substitusi impor. Industri ini harus digalakkan agar dunia usaha tetap kuat di tengah gejolak kurs. "Kita tidak ingin terus terperosok karena nilai tukar rupiah yang melemah terus seperti ini,"ujarnya. (Koran Sindo)

C. SOSBUD

:

1. Biaya Perekrutan TKI Terlalu Mahal

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) prihatin atas mahalnya biaya perekrutan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 5 juta/orang dari sponsor, sehingga terkesan TKI menjadi barang dagangan.

Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Yunus M Yamani di Jakarta, baru-baru ini mengatakan, untuk mengikis praktik tersebut, sebaiknya penempatan TKI ke luar negeri, terutama Arab Saudi, menggunakan mekanisme kuota sehingga penempatan TKI pun terkendali.

Menurut Yunus, untuk mendapatkan TKI ke Timur Tengah dari sponsor atau calo dibutuhkan biaya Rp 4 juta-5 juta/TKI. "Praktik seperti ini sama dengan jual beli manusia saja," kata Yunus.

Kondisi itu juga menimbulkan kesenjangan, sebab PJTKI yang bermodal besar bisa "membeli" TKI sebanyak-banyaknya, sedangkan yang bermodal pas-pasan pasti kewalahan.

Untuk menghindari bisnis yang bersifat kapitalis itu, Yunus mengusulkan agar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengeluarkan kebijakan tentang kuota, khususnya ke Arab Saudi.

"Dengan begitu, PPJTKI tidak jor-joran untuk 'membeli' kepada sponsor atau calo. PPJTKI juga mempunyai waktu untuk mendidik dan melatih kemampuan bahasa mereka agar lebih siap untuk bekerja di luar negeri," kata Yunus, yang juga ketua Crisis Center itu.

Sementara itu, Migran Care meminta pemerintah agar tidak menempatkan TKI secara besar-besaran, terlebih lagi dengan memberi target penempatan satu juta pada tahun ini. LSM itu meminta pemerintah agar tidak melihat penempatan TKI sebagai peluang bisnis, dan

mengabaikan aspek perlindungan yang berujung pada kekerasan dan eksploitasi terhadap buruh migran, sejak prapenempatan hingga mereka pulang ke Tanah Air.

Berdasarkan kajian beberapa LSM, yang peduli pada advokasi buruh migran, UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, lemah secara konsep dan substansi. Secara konsep, UU itu hanya terfokus pada penempatan dari pada perlindungan. Secara substansi, UU itu dinilai kabur dalam tanggung jawab dan pemenuhan hak-hak buruh migran.

"Parahnya lagi, sejak diberlakukan, UU tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya," demikian bunyi siaran pers Migrant Care tersebut.

Sementara itu, sebagai negara pengirim tenaga kerja terbesar, Indonesia sampai saat ini belum juga meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. (Suara Pembaruan)

2. Half of civil servants are unqualified, says minister

Responding to discouraging results of recent public service surveys, State Minister for Administrative Reforms Taufiq Effendi revealed half of the country's four million civil servants were unqualified.

He said his office was preparing to reassign two million unqualified officials to other government jobs in an effort to tackle bureaucratic inefficiencies that leaked money.

"They will undergo a series of training to make them fit for other jobs within the government," the minister told the press after addressing a World Bank-sponsored seminar on bureaucratic reforms in Jakarta on Wednesday.

"We began this process in 2005, and some 300,000 civil servants will be reassigned to other jobs each year," he said.

Taufiq said the massive reshuffle had begun as a pilot project surveying three offices — the Finance Ministry, the Supreme Court and the Supreme Audit Body (BPK).

He said of the 63,000 officials at the Finance Ministry, only 30,000 were qualified to do their jobs, adding that the situation was worse at the other two offices.

"We're not a charitable institution. We can no longer afford to pay people who don't work properly," the minister added.

The government spent Rp 123.5 trillion this year paying the salaries of more than four million civil servants -- 17.7 percent of the state budget.

However, Taufiq said none of the unqualified officials would be fired.

He said a previous reshuffle at the Finance Ministry had resulted in state revenue rising 35 percent thanks to reorganized tax regimes.

Taufiq said the minister's plan was supported by the fact that some 120,000 officials retired every year.

"We still have a very imbalanced distribution of civil servants. In some regions we have an excess of personnel while in many other regions we lack people. That's why we still recruit some 25,000 qualified people every year," he said.

He said more officials were needed in a number of sectors, including agriculture and industry.

Taufiq said officials reassigned from the Finance Ministry would be trained as agricultural consultants and posted to villages throughout the country.

Most surveys conducted on Indonesia's civil servants have not made for pleasant reading, with reports of corruption and inefficiencies prevalent.

The Governance Assessment Survey, conducted last year by Yogyakarta's Gadjah Mada University in collaboration with the Partnership for Governance Reform found public services were poor.

Only 20 percent of the interviewed respondents believe human resources at health offices are qualified, while the majority of them say bureaucracy is more concerned with its own needs rather than those of the public.

This year's survey by the Corruption Eradication Commission (KPK) revealed the public sector had a low integrity score of 5.33 out of a possible 10, far lower than in most other countries.

A report issued on March 4 by the Switzerland-based World Economic Forum cited Indonesia's poor health and hygiene services and inadequate infrastructure as key disadvantages to attracting foreign visitors.

"With the reforms, ultimately we want to have better public services and attract foreign investors for the betterment of the people," said Rusdiarto, a senior official at Taufiq's office. (The Jakarta Post)

3. Demand for Indonesian workers on the rise

Demand for Indonesian migrant workers in the overseas formal sector is on the rise, with hospitals, hotels and transportation and construction companies the main employers, an official says.

Head of the National Labor Placement and Protection Agency (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat said his office prioritized sending migrant workers to work in the formal sector.

"From a safety point of view, it is better for workers to be in the formal sector because they are protected by labor laws," he said.

He said Indonesia's migrant workers employed in the informal sector, such as housemaids, far outnumbered those employed in the formal sector. Of Indonesia's estimated 4.3 million migrant workers, 64 percent are employed as domestic maids.

"Around 95 percent of migrant workers facing problems work in the informal sector," said Jumhur on the sidelines of a regional coordination meeting in Makassar on Wednesday.

"They are susceptible because their work is not regulated by labor laws, so we prioritize those in the formal sector. We will increase our scrutiny in the housemaid selection process."

He said the recruitment process for jobs in the formal sector took into account skills and expertise, command of English and knowledge of manpower regulations, especially those concerning rights and obligations.

Jumhur said thousands of Indonesians were employed as nurses in the Middle East.

They work in hospitals or private homes, earning between Rp 5 million (US\$403) and Rp 6 million monthly in the private sector and from Rp 10 million to Rp 12 million at state-run hospitals.

South Sulawesi is set to send up to 1,000 nurses to Kuwait.

"We are ready to send another batch of 1,000 nurses to Kuwait. We have already sent 2,129 migrant workers to various Asia Pacific and Middle Eastern countries this year, including nurses, drivers, construction workers and plantation workers," South Sulawesi Governor Syahrul Yasin Limpo said.

This year, migrant workers from South Sulawesi sent home a total of Rp 4 billion in remittances to their families.

"The most important thing is that our migrant workers become the motivating factor for others as a way to minimize unemployment. We hope in 2010 the number of migrant workers from South Sulawesi will reach 20,000," he said.

Responding to questions on how Indonesia can protect its migrant workers from rights violations, Jumhur said his office was continuously coordinating with recruitment agencies in the province to safeguard migrant workers' rights and jobs.

He said his office had also coordinated with foreign recruitment agencies to provide Indonesian migrant workers with insurance, outreach centers and monitoring posts in airports as places for them to lodge complaints.

"We definitely coordinate with our representatives overseas, such as our embassies, to oversee our migrant workers, although we do not hope for much," he said. (The Jakarta Post).

D. HANKAM :

1. Papua, Wilayah yang Penuh Ancaman

Papua, tanah yang penuh ancaman, karena sampai saat ini ribuan orang Papua hidup dalam ketakutan, 4.000 di antaranya meninggal dunia karena menderita HIV/Aids, bahkan tidak sedikit yang tewas karena kecelakaan lalu lintas, dibunuh, dan menderita berbagai sebab hingga menemui ajalnya. Padahal, jumlah penduduk asli Papua hanya sekitar 1 juta orang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid, ketika menyampaikan pidato politiknya pada peringatan hari ulang yang disebut sebagai Tahun Kemerdekaan Papua Ke- 47, Senin, (1/12) di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Sentani, Jayapura, Papua. Taman tersebut adalah area

pemakaman Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay yang meninggal dunia karena tindakan kekerasan aparat TNI tanggal 10 November 2001 di Jayapura.

Thaha Al Hamid mengakui dengan kondisi yang ada merupakan indikasi bahwa masyarakat asli Papua sedang menuju pada proses pemusnahan. Oleh karena itu, melalui perayaan tersebut, pihaknya mengajak seluruh rakyat Papua untuk merenungkan hal itu.

"Sejak integrasi ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Mei 1963, orang Papua selalu termarginalkan. Mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Dalam bidang ekonomi misalnya, mereka hanya berjualan di emperen pasar atau duduk berjualan di atas tanah," tegas Thaha. (Suara Pembaruan)

E. HUKUM

:

1. BHP Khianati Pancasila dan UUD 1945

Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) harus dibatalkan. Sebab, RUU ini mengkhianati Pancasila dan hanya akan memburamkan wajah pendidikan nasional. Salah satu contohnya adalah orang miskin kian sulit mendapatkan akses pendidikan bermutu.

Demikian benang merah diskusi bertajuk Menolak BHP, di Jakarta, Selasa (2/12). Acara yang digagas Koalisi Pendidikan itu dihadiri oleh sejumlah pakar dan penggiat pendidikan, antara lain HAR Tilaar, Winarno Surakhmad, dan Darmaningtyas. "BHP harus ditolak," kata HAR Tilaar.

Menurut dia, skenario pemerintah dengan merencanakan penerapan BHP di semua jenjang pendidikan sudah bisa terlihat, yakni menyerahkan sektor pendidikan kepada mekanisme persaingan. "Kalau sudah begini, komersialisasi pendidikan makin tidak bisa dibendung," katanya.

Dia menerangkan, pada dasarnya, RUU BHP lebih membicarakan masalah uang dan tidak menjawab masalah pendidikan. Justru sebaliknya, mengaburkan makna pendidikan.

Menurutnya, dalam BHP banyak sekali agenda terselubung yang tidak diketahui masyarakat. Misalnya, tujuan BHP adalah persaingan yang diserahkan kepada mekanisme pasar. "Persaingan dalam esensi pendidikan nasional sama sekali bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," katanya.

Dikatakan, jika akhirnya BHP tetap disahkan, maka BHP tersebut sangat prematur. Otonomi yang termaktub dalam jiwa BHP sebenarnya merupakan pembohongan publik. "Ini akan semakin memburamkan wajah pendidikan kita," katanya.

Menurutnya, dalam RUU BHP masih terbuka celah ke arah liberalisasi dan komersialisasi. "Kalau nanti kampus menaikkan SPP tanpa tanggung-tanggung karena biaya operasional juga naik, siapa yang akan melakukan kontrol," katanya.

Sebuah universitas, lanjutnya, ketika berstatus BHP akan bertambah kewajiban-kewajibannya. Sebagai contoh, sebuah universitas bisa saja mempunyai lahan seluas 300 hektare. Jika statusnya menjadi BHP, maka otomatis kampus tersebutlah yang akan membayar pajaknya. "Kalau kampus tidak mampu, maka otomatis beban pajak itu dibebankan ke mahasiswa," ucapnya.

Memihak yang Miskin

Namun, argumentasi bahwa BHP akan mengaburkan makna pendidikan karena UU tersebut akan melegalkan komersialisasi asing masuk dalam pendidikan dibantah Ketua Tim Perumus RUU BHP Anwar Arifin. Dihubungi Selasa malam, Anwar mengatakan, RUU BHP justru mengakomodasi dan dianggap telah berpihak kepada masyarakat miskin. Sebab, bab pendanaan pendidikan dalam RUU BHP telah disepakati Komisi X DPR dan Depdiknas. "RUU itu juga mengatur porsi pembiayaan antara pemerintah, pemerintah daerah, BHP, dan masyarakat.

Dikatakan, untuk pendidikan menengah dan tinggi, masyarakat akan menanggung paling banyak sepertiga biaya operasional pendidikan. Sedangkan, pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) akan menanggung biaya operasional paling sedikit setengah. "Sedang untuk pendidikan dasar pemerintah dan pemerintah daerah akan menanggung semua biaya," katanya.

Adapun sisanya, terangnya, yaitu seperenam dari biaya operasional, bisa ditutupi dari sumbangan masyarakat. "Bisa juga dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan," katanya.

Rumusan pendanaan BHP kali ini, katanya, telah berpihak kepada masyarakat sehingga tidak akan terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. (Suara Pembaruan)

2. 80 Persen UU Dituding Abaikan HAM

Lebih dari 80 persen Undang-Undang (UU) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2005-2008 dinilai mengabaikan hak asasi manusia.

Dari 129 UU yang disahkan, sekitar 34 UU terkait dengan isu HAM, namun hanya 18 yang benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Demikian diungkapkan Asisten Deputi Program Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati dalam keterangan pers mengenai evaluasi kinerja legislasi DPR RI 2004-2009 di Warung Daun Menteng Jakarta, Kamis (4/12).

"HAM hanya dikaitkan dengan UU dan tak dipergunakan sebagai instrumen yang integral dalam proses penyusunannya," ujar Indriaswati. Ia juga mencontohkan bahwa UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mencerminkan perlindungan HAM sama sekali, misalnya berupa pembahasan mengenai hak korban dan saksi sendiri.

Peneliti Senior Politik dan HAM Elsam, Amiruddin al Rahab mengatakan DPR RI periode ini entah dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah mengabaikan prinsip HAM yang telah tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menurut Amir, setiap pembahasan UU seharusnya menjamin tiga hal terkait HAM, meliputi melindungi, memenuhi dan memajukan HAM dan mengatur perwujudannya. "Nah, yang terjadi di beberapa UU adalah menghalangi ketiganya," tandas Amir.

Elsam memberikan rapor merah kepada DPR terkait fungsi legislasi yang dilakukan periode 2004-2009. Dari Rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) saja, dari 284 UU yang seharusnya dibahas dan disahkan, hanya 39 UU yang masuk dalam daftar Prolegnas. (Kompas)

3. Depkominfo Siapkan Komponen Hambat Kejahatan Maya

Departemen Komunikasi dan Informasi menyiapkan empat komponen untuk menghambat kejahatan dunia maya, terutama yang berkaitan dengan pornografi.

Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informasi Muhammad Nuh usai membuka Konvensi Nasional Humas Perhumas Indonesia 2008 di Batam, Kamis (4/12). Menteri menyebutkan empat komponen itu adalah penyiapan institusi permanen, penguasaan teknologi, pembuatan regulasi, dan persiapan masyarakat.

Institusi permanen dibutuhkan untuk mengawasi pergerakan dunia maya, ujar Nuh "Tidak perlu dari Depkominfo, tapi ada di bawah Kominform," kata Nuh lagi.

Personel institusi itu, menurut Nuh, terdiri dari karyawan lintas departemen, termasuk Departemen Agama. Selain pembentukan institusi, menurut dia, perlu penambahan penguasaan teknologi.

Pembendungan kejahatan dunia maya juga membutuhkan regulasi, baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lainnya.

Saat ini, sudah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun, itu dinilai belum cukup. "Dengan regulasi, ada pengadilan pemerintah, tidak lagi masyarakat," kata Nuh. Dan terakhir, perlu penyiapan masyarakat. "Tentu kita ingin partisipasi dari masyarakat," ujar menteri tamatan ITS Surabaya itu.

Menurut menteri, institusi permanen belum cukup jika tidak berbarengan dengan penyiapan masyarakat, karena institusi tidak bisa mengecek setiap "trafick" dunia maya.

Cara mem-"block" kejahatan maya, yaitu dengan *personal blocking*, melalui administrasi dan *blocking Internet Service Provider (ISP)*.

Usai membuka KNH Indonesia Perhumas 2008 Muhammad Nuh menjadi pembicara utama dengan topik pentingnya "Nation Branding" bagi citra Indonesia di dunia Internasional.

Selain Menteri Kominform, KNH Indonesia 2008 juga menghadirkan 18 pembicara antara lain Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah, Sudirman Said, Vice President Public Affair

ExxonMobil Maman Budiman, Corporate Secretary Astra International Aminuddin, dan Atmakusumah Astraatmaja. (Republika)

4. AS Bantu Kejagung Berantas Korupsi

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Cameron Hume mewakili pemerintah AS memberikan bantuan kepada Kejaksaan Agung terkait rangkaian peringatan Hari Antikorupsi se dunia 9 Desember mendatang. Bantuan yang diperuntukkan bagi Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi itu diberikan setelah Hendarman Supandji menggelar apel Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak Dini (Galaksi) yang dihadiri ribuan siswa se-Jabodetabek, Selasa kemarin. Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan merinci, bantuan yang diberikan berupa komputer, laptop, toner, flash disc, printer, handycam, kamera, proyektor, mesin fotokopi, LCD TV, dispenser, filling kabinet, meja, whiteboard, dan kertas. "Bantuan tersebut langsung diterima oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji," ujarnya di Jakarta, Rabu. (Suara Karya)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Indonesia Usulkan Visi Bersama Perubahan Iklim di Forum PBB

Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar berupaya meyakinkan negara-negara peserta agar dalam konferensi PBB ke-14 tentang perubahan iklim (COP-14 UNFCCC) dapat dibahas visi bersama perubahan iklim secara mendalam.

Menurut siaran pers Kedubes RI di Warsawa, Kamis, desakan Indonesia itu muncul karena pada pembukaan persidangan COP-14 yang berlangsung di Poznan, Polandia, beberapa delegasi, terutama dari negara berkembang, menunjukkan keberatan dan bahkan mengusulkan agar pembahasan visi bersama dilakukan pada sesi pertama persidangan tahun 2009.

Keberatan beberapa negara pihak ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa pembahasan visi bersama akan lebih banyak menyoroiti isu mitigasi atau pengurangan emisi yang pada gilirannya akan memberatkan negara-negara berkembang sekiranya dikenakan kewajiban baru untuk pengurangan emisi.

Dubes RI di Polandia Hazairin Pohan mengatakan delegasi Indonesia menekankan pentingnya pembahasan visi bersama guna menjaga momentum Bali Action Plan (BAP) sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama perubahan iklim pada COP-15 di Kopenhagen tahun 2009.

Delegasi RI, lanjut Pohan, berpendapat bahwa pembahasan visi bersama justru perlu dilakukan karena sesuai dengan kepentingan negara-negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Anggota delegasi RI Agus Purnomo mengemukakan bahwa visi bersama harus diartikan sebagai pendekatan integratif yang tidak hanya memberikan perhatian kepada isu pengurangan emisi, akan tetapi memberikan perhatian yang sama besarnya kepada isu perubahan iklim lainnya yaitu, adaptasi, transfer teknologi dan sumber pendanaan.

Indonesia meyakini bahwa visi bersama harus mampu membuka jalan baik pelaksanaan konvensi secara tepat waktu melalui penguatan seluruh elemen Bali Action Plan menuju kepada pencapaian tujuan utama Konvensi.

Delegasi Indonesia juga mendesak agar negara-negara maju menunjukkan kepemimpinan yang sesungguhnya dalam upaya global untuk melaksanakan konvensi dan di pihak lain negara berkembang memainkan peran penting melalui penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim dengan didukung ketersediaan teknologi, perdanaan dan pengembangan kapasitas. (Antara)

III. ARTIKEL :

1. Making ASEAN for the people

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

As the country currently chairing the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Thailand's Ministry of Foreign Affairs recently came up with the campaign slogan: "ASEAN Charter for ASEAN People," referring to the organizations newly ratified charter.

To observers of ASEAN, this phase comes as a new and positive change. This sub-regional, inter-governmental body has always been referred to as the governments' club and has been constantly criticized for its lack of involvement from the people of its member nations.

On Oct. 21, 2008, Indonesia became the final ASEAN member state to ratify the Charter. In accordance with the country's internal procedures, ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan, said that, "ASEAN will be a rules-based, people-oriented and more integrated entity".

It is highlighted in the chapter relating to the purpose of ASEAN (Article 1) that the association will "promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in and benefit from (...) ASEAN integration and community building". While this is one of the more positive points within the charter, civil society groups are still skeptical about whether ASEAN can actually fulfill this, as they have never been informed of ASEAN processes. This is evident in the fact that, when civil society groups within ASEAN want to raise concerns regionally or internationally, they go directly to UN bodies rather than ASEAN.

As the phrase "people" has been overly used by ASEAN, we the civil society have to question if the ratification of this charter can immediately transform this inter-governmental body into a people-oriented organization that can inspire people on the ground.

The network of more than 40 civil society organizations that have been monitoring the work of ASEAN under the umbrella of the Solidarity for Asian Peoples' Advocacy's (SAPA) Working Group on ASEAN, began analyzing the charter last year, prior to its signing and concluded that it was "a disappointment (since) it is a document that falls short of what is needed to establish a people-centered (ASEAN)".

While the ASEAN Charter contains positive phases including sections on ASEANs role in promoting and protecting "human rights and social justice", respecting the rule of law and good governance and respecting the UN Charter and international laws, the unpopular principle of non-interference and the respect of consensus is still one of its core principles. It is comical that, as the human rights situation in Myanmar continues to deteriorate, ASEAN claims to protect human rights and social justice at the same time it holds so dear the principle of non-interference.

ASEAN has yet to assess whether the human rights situation in Myanmar has improved since 1997, when the country was accepted as a member of the association. To the human rights defenders working on Myanmar, the detention of pro-democracy leader Daw Aung San Suu Kyi as well as more than 2,000 other political prisoners, the continued use of child soldiers and the recent detention of dozens of domestic activists, including the leaders of the 1988 Student Generation, who took part in the September Saffron Revolution, are all too characteristic of Myanmar's appalling record on human rights.

When we look at the Charter chapter by chapter, we can see that the "people-centered" principle is still only a vision, far from actually being implemented. The Charter is still state-centric, which is perhaps not surprising, given that it was written by government officials, without genuine consultation with civic groups.

There is no mention of any institutionalized mechanism, such as the Consultative Status afforded to NGOs at the UN, which would allow civil society to contribute to or comment on ASEANs decision-making process. In all the chapters relating to the work of the ASEAN Summit, ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Councils, or the ASEAN Secretariat, not a single clause mentions the involvement of "the people".

Civil society is mentioned only in the section on the role of the ASEAN Foundation in promoting greater awareness of the, "ASEAN identity", and ensuring, "close(er) collaboration among the business sector, civil society, academia and other stakeholders in ASEAN".

The mentality of ASEAN leaders seems to be that civil society plays only a socio-cultural role. They are allowed to be informed about ASEANs decisions, but they cannot play a direct role in the decision-making process, even in areas that directly affect them (namely political-security and economic matters).

ASEAN leaders should take note that there has been increasing interest among civil society groups based in their countries, who believe that the association could become an effective forum for addressing the concerns of the people. Trans-boundary issues such as the flow of migrant workers, human trafficking and refugees, among others, would be especially

relevant. The plan to establish the ASEAN human rights body could be just the first step toward this.

The upcoming ASEAN Peoples' Forum/4th ASEAN Civil Society Conference, to be held prior to the 14th ASEAN Summit will be an important venue for ASEAN leaders and governments to actually listen and gain inspiration from the people of what they want ASEAN to be and to do. The ASEAN Charter, while it is not the charter the people wished to see, could be a start in making the organization more people-oriented. ASEAN needs to open up and listen to the people more, in all of its deliberations. This is a must for ASEAN governments if they wish for more comprehensive change. If not, the association will continue to be people-disoriented instead of a place where decisions are actually based around the people. (The Jakarta Post)
The writer is a Southeast Asia Program Officer with the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA).

2. Metode Alternatif Pemenangan Pemilu Oleh Affan Alamudi

Tulisan Saudara Bestian Nainggolan dari Litbang Kompas dalam harian tersebut tanggal 17 November berjudul Masih Layakkah Survei Dipercaya sungguh menarik untuk dicermati. Polling politik atau jajak pendapat sedang mendapat sorotan karena ketidakakuratannya, khususnya dalam memprediksi beberapa pilkada, belakangan ini. Metodologi serta mekanisme polling politik menuai kritikan dan suara sumbang dari beberapa pengamat, politisi, bahkan ahli-politik. Hingga saat ini, aktivitas ini tetap mendapat sorotan tersendiri dari media massa dan masyarakat.

Apabila kita teliti lebih lanjut, ketidakakuratan polling adalah satu hal biasa. Satu contoh legendaris adalah Thomas Dewey, yang berdasarkan polling akan mengalahkan Harry Truman pada Pemilu AS tahun 1948, yang terbukti salah. Sebuah penelitian di California, pada 2003, menunjukkan bahwa hanya satu dari 20 polling mendapatkan hasil yang tepat. Ini berarti 95 persen polling tidak akurat.

Sebenarnya, polling adalah perangkat yang sangat tepat untuk mengukur persepsi, seperti pendapat mengenai suatu partai politik, seorang calon presiden, atau terhadap sebuah isu. Akan tetapi, sering orang menggunakan polling untuk mengukur behavior atau perilaku, seperti tendensi untuk memilih partai atau seorang calon presiden.

Penggunaan sampel yang sangat kecil - biasanya 2.000 sampai 3.000 responden - untuk mengeneralisir seluruh populasi pemilih di Indonesia juga menyebabkan hasil yang bias. Media massa yang kurang memahami sifat dari metodologi survei akhirnya menelan mentah-mentah hasil survei hingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi tidak tepat.

Agar polling tepat, populasi yang diukur persepsinya harus stabil. Stabil dalam artian opini dan persepsi. Penduduk Indonesia bukanlah populasi yang stabil. Keanekaragaman dan berbagai dinamika perubahan dalam masyarakat menyebabkan survei semakin tidak akurat. Ditambah, polling juga tidak dapat menangkap informasi secara mikro, melainkan hanya secara random, dalam skala nasional. Lebih dari 71.000 kelurahan di Indonesia, metode jajak pendapat tidak dapat melihat lebih dalam perbedaan pada populasi di tingkatan demografis yang lebih rendah ini.

Perbedaan yang sangat bervariasi antarberbagi penyelenggara jajak pendapat ini menimbulkan pertanyaan, penyelenggara survei mana yang layak dipercaya? Ini lebih penting lagi bagi partai politik, capres, dan caleg yang sedang berkampanye memperebutkan kursi parlemen.

Pemikiran yang kritis serta kecermatan dalam membaca hasil polling mungkin merupakan kunci utama. Argumen mengenai metodologi yang dipergunakan dalam jajak pendapat menjadi sorotan utama. Kembali lagi, sampel yang digunakan dalam jajak pendapat - khususnya di Indonesia - jumlahnya sangat kecil dalam sebuah populasi yang tidak stabil. Penggunaan pelanggan telepon sebagai population sample, yang kerap digunakan, menjadi salah satu penyebab hasil yang bias. Berbeda dengan negara-negara barat di mana pelanggan telepon sudah di atas 95 persen, penggunaan metode sampling cara ini kurang pas diterapkan di Indonesia.

Norman Bradburn dari University of Chicago memberikan istilah self-selected listener oriented public (SLOP) pada penggunaan metode yang tampak seperti mencerminkan pendapat publik, padahal sesungguhnya tidak demikian.

Apa artinya semua ini bagi partai politik, caleg, dan capres menjelang Pemilu 2009? Apakah mereka dapat memperkirakan jumlah suara yang akan didapatkan menggunakan polling? Apakah mereka mengetahui indikasi ke mana swing voters akan memberikan suara mereka? Secara sosial politik, akan sangat sulit mengatakan bahwa metodologi jajak pendapat bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

"Microtargeting"

Lantas metodologi apalagi yang dapat dipergunakan?

Selama satu dasawarsa ini, tim-tim kampanye di Amerika Serikat, baik itu untuk Bush (Senior dan Junior), Obama, Clinton, dan McCain, menggunakan metode microtargeting untuk mengidentifikasi, mencari, dan mendapatkan tendensi voter behavior.

Microtargeting, yang pada awalnya adalah sebuah perangkat CRM (customer relationship management), menggunakan informasi relevan yang tersedia seperti data demografis, geografis, psikografis, dan data lainnya dikaitkan dengan perilaku konsumen yang kemudian dianalisis dan diolah secara algoritmis sistematis. Dalam konteks politik, microtargeting berkembang menjadi sebuah perangkat constituent relationship management.

Budiarto Shambazy (Kompas 19/04/08) mengatakan bahwa pilkada di Aceh, Jabar, dan Sumut wajib diantisipasi melalui microtargeting pemilih yang berubah. Pilpres 2009 bukan lagi ajang jualan citra, tetapi jualan substansi. Pada era digital, saat ini, begitu banyak metode yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Taktik microtargeting bertujuan menyampaikan pesan yang "dijahit" berdasarkan riset terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam Pemilu AS November lalu, baik tim kampanye McCain maupun Obama menggunakan teknik microtargeting untuk memonitor popularitas capres berdasarkan berbagai jenis cluster pemilih yang dihasilkan oleh metode ini.

Penggunaan teknik microtargeting juga memberikan kesempatan bagi parpol dan capres untuk mengidentifikasi para pemilih berdasarkan cluster demografis, pattern historis pemilih, dan predictive segmentation. Obama menggunakan microtargeting dengan pendekatan teknologi informasi yang lebih canggih. Dengan informasi yang dimiliki, ia mampu menyampaikan pesan-pesan politik yang lebih mengena bagi tiap cluster.

Bagi negara yang sangat majemuk dan heterogen, seperti Indonesia, kampanye politik dengan menggunakan microtargeting sangat membantu upaya-upaya constituent outreach untuk mengoptimalkan perolehan suara di mana terdapat rasio swing dan undecided voters tampak tinggi.

Microtargeting juga memberikan prediksi atas perilaku pemilih yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan polling. Menariknya, ini tidak berarti bahwa kampanye dengan microtargeting melupakan kampanye konvensional. Malah, akan sangat membantu dengan mengarahkan tim-tim kampanye ke sasaran yang tepat, baik itu dalam pemasangan atribut kampanye, pembagian sembako, dan kegiatan-kegiatan kampanye lainnya.

Paradigma kampanye politik konvensional sudah waktunya berkembang. Masyarakat semakin pandai dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, sudah waktunya partai politik dan capres untuk lebih cerdas dalam menggapai para pemilihnya. (Suara Pembaruan)

3. Politisi Indonesia dan Semangat Obama Oleh Nicolaus Uskono MSI

Melihat Barack Obama berpidato, ingatan kita akan kembali pada kenangan saat presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, berpidato. Semua orang menghentikan aktivitas saat melihat mereka berpidato di televisi atau mendengar di radio.

Melihat Obama atau Soekarno berpidato, seperti melihat pentas kehidupan penuh warna dipaparkan di hadapan kita. Obama mampu berargumentasi dengan tenang dan tidak termakan emosi oleh kampanye negatif lawan-lawannya. Semua kampanye negatif itu mampu disangkal Obama dengan penjelasan yang singkat, logis, dan membuat lawannya tidak memiliki amunisi untuk menyerangnya. Namun, tentu kemampuan pidato saja tidak cukup. Seorang politikus sekaliber Obama mampu menaklukkan publik AS karena memang dinilai layak.

Apa yang bisa dipetik dari fenomena luar biasa itu, terutama bagi politisi kita? Pertama, sejarah pergulatan hidup mantan Senator Illinois itu mampu membuktikan yang dikatakan oleh penulis buku *Berpikir dan Berjiwa Besar*, David J Schwartz. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa banyak orang yang pandai beralasan untuk menunjukkan mengapa dia gagal. Dalam posisi Obama, sebenarnya dia bisa membuat banyak alasan untuk gagal.

Misalnya dia berkulit hitam. Namun, Obama sejak berusia belasan tahun di Jakarta mengatakan pada gurunya, bahwa dia ingin menjadi presiden. Itu artinya Obama telah membuat keputusan sejak awal bahwa dia akan menjadi Presiden AS kala itu. Tampaknya Obama terlalu "cerdas" untuk menghiraukan alasan terbesar, sekaligus fakta terbesar bahwa dia seorang kulit hitam. Obama memutuskan untuk tidak menjadikan alasan terbesar itu sebagai penghalangnya.

Sebaliknya, dia mampu membalik kelemahannya paling mendasar itu sebagai kekuatan paling mendasar pula. Dalam berbagai kampanye Obama menegaskan bahwa dialah calon pencetak sejarah sebagai presiden AS kulit hitam pertama dalam 232 tahun sejarah berdirinya Negeri Paman Sam. Kekuatan sugesti yang mampu dipancarkan pria kulit hitam itu pun mampu memengaruhi publik AS. Pendukungnya pun tidak hanya dari kalangan kulit hitam, tapi juga berasal dari kalangan hispanik, pekerja kulit putih, kelas menengah, kelas atas, bahkan dari kalangan selebriti.

Obama juga konsisten dengan tema kampanye yang singkat, padat, jelas, yakni satu kata, "change" atau perubahan. Kata itu sudah mewakili semua hal yang bisa dijelaskan lebih detail dalam setiap kampanyenya. Obama tidak mengumbar banyak kata untuk menjelaskan inti isunya.

*** Politisi Indonesia tentu bisa belajar dari beberapa catatan di atas, ketika kita ingin belajar dari Obama yang memang memiliki sedikit "cita rasa" Indonesia. Pertama, politisi kita harus bisa menjadikan kelemahan terbesarnya sebagai kekuatan terbesar untuk mengalahkan lawan-lawannya.

Yang memprihatinkan, banyak dari pemuda Indonesia yang berlingung di balik kelemahannya. Seperti dikatakan Paulo Coelho, saat kita bermimpi, alam semesta akan membantu mewujudkan impian kita. Keyakinan ini bisa ditanamkan sejak dini pada para pemuda, yang itu merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Mereka jangan takut untuk bermimpi, seperti Obama yang saat kecil hingga dewasa merasa ringan dan tanpa dosa, untuk bermimpi menjadi presiden AS.

Kedua, politisi kita harus memiliki kemampuan "menjual" idenya dengan strategi "marketing" yang elegan. Mereka harus memiliki visi jangka panjang yang jelas tentang tujuan maju sebagai politisi. Tentu saja mereka harus memiliki idealisme untuk memperjuangkan rakyat kecil. Perlu ditekankan, kemenangan Obama sebagian besar karena dukungan suara dari kalangan menengah ke bawah. Mereka menyukai rencana pemotongan pajak yang dikemukakan Obama dalam kampanye.

Kalangan menengah ke bawah inilah yang juga harus dibela oleh politisi kita. Jika seorang politisi hanya memikirkan kepentingan elite, dia mungkin tidak akan langgeng memegang kekuasaan, kecuali dia bermain curang atau melakukan jual beli suara. Karena logika demokrasi adalah logika dukungan suara, dan dukungan suara terbesar itu dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah, alias rakyat kecil di pedesaan.

Ide yang hendak dijual politisi kita dalam kampanye mereka nanti harus jelas dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Tentu saja, ide tersebut harus diuji oleh publik melalui debat terbuka, seperti yang ada dalam iklim demokrasi yang sehat. Debat terbuka ini penting dilakukan untuk mendewasakan konstituen kita tentang makna kebebasan mengemukakan pendapat. Selama ini konstituen kita masih terpasung oleh doktrin politik lama yang mengekang kebebasan pendapat.

*** Obama membangun keahlian kepemimpinannya sejak dini. Saat sekolah dasar di Jakarta dulu Obama paling suka jika disuruh menghapus papan tulis di depan. Karakter Obama yang ceria dan selalu berpikir positif dapat dilihat sepanjang perjalanan hidupnya. Obama juga selalu terlibat aktif dalam organisasi kampusnya.

Terlibat dalam organisasi itu jelas menempa jiwa kepemimpinan Obama hingga dia juga pernah ditunjuk sebagai President Harvard Law Review. Obama juga aktif terlibat sebagai pengelola komunitas dan berpraktik sebagai pengacara hak asasi sipil, sebelum akhirnya dia terjun sebagai Senator Illinois selama tiga periode, sejak 1997 hingga 2004. Politisi kita harus belajar, bahwa skill kepemimpinan mereka harus dilatih sejak dini dalam kiprah nyata mereka di masyarakat.

Sangat disayangkan, kita jarang melihat skill kepemimpinan yang mumpuni ditunjukkan anggota Dewan kita. Yang sering kita saksikan, mereka tidak bisa memimpin diri mereka sendiri saat terungkap di pengadilan terlibat kasus korupsi hingga masalah perselingkuhan. Memiliki tokoh-tokoh pembaru seperti Obama di AS bukanlah ilusi. Kita bahkan telah memiliki banyak

contoh, para pendahulu kita, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, yang menunjukkan kepiawaian "melampaui" zamannya.

Bahkan kepiawaian mereka di atas rata-rata bangsa lain di Asia-Pasifik hingga Eropa dan AS. Kala itu bangsa Indonesia disegani oleh negara-negara lain dan kita sebagai bangsa bisa berjalan dengan badan tegak ke depan. Kita penuh percaya diri saat ini, seperti saat kemenangan Obama di AS sekarang. Sebenarnya Obama "hanyalah" pengingat kejayaan bangsa kita dulu di era Soekarno-Hatta.

Kita harus membangkitkan lagi kewibawaan itu sekarang. Saat bangsa ini terpuruk dari berbagai sektor, mulai dari keterpurukan moral, ekonomi, ketahanan sosial, budaya, militer, kita harus bangkit. Kita harus memiliki para politisi dengan semangat perubahan! (Antara)

IV. LAIN-LAIN

:

1. Discourse: Government must increase spending, create more jobs, to deal with crisis

The global financial downturn is already being felt in Indonesia in various ways. Gustav F. Papanek, president of Boston Institute for Developing Economies, who has studied the Indonesian economy for a long time, discussed this issue with The Jakarta Post's Riyadi Suparno. Following are excerpts.

GUSTAV F. PAPANEK: (JP/Riyadi Suparno)

How is the global crisis affecting Indonesia?

This crisis is very much made in the U.S., but it doesn't protect Indonesia from the consequences. There are several ways that Indonesia will be affected.

The first one is in its exports. Indonesian exports of commodities have been booming, especially coal, palm oil, but they are now falling very rapidly. My estimate is that by 2009, the exports of Indonesia will be US\$30 billion to \$40 billion less from 2008 (to between \$100 billion to \$110 billion).

What does that mean for the average person in Indonesia? It means that for people working in these commodities' production, they may lose their jobs. Instead of more people being hired, some people will probably lose their jobs. Above all, the income coming into the country will decrease.

The second thing that will happen in Indonesia, there is a credit crisis, which means banks do not want to lend money, which means people will not be able to buy as many motorcycles, will not be able to build as many houses. When you don't have credit, when you can't borrow from banks, everything slows down.

The third impact is for Indonesians who used to go to Malaysia, Singapore, Hong Kong and the Gulf States, which grew from year to year, but now, these countries are hard hit, they will hire fewer Indonesians. And some of those who went last year and the year before, have gone back, and instead of sending money, they are needing money.

How should we better respond to the crisis?

There are two ways of adjusting to a crisis like this. One is contractionary stabilization, like what the International Monetary Fund used to recommend: You cut government spending, you raise interest rates and you defend the rupiah at all costs.

You can deal with the crisis that way, but the pain is terrible. A lot more people will lose their jobs, people's income will go down. When people's income goes down, government revenue becomes less, so you have to cut expenditure even more, and people's income goes down even more, and it creates a vicious circle. Things come into a new balance, but at a very low level. People will be unhappy, you will have social and political disturbances, and this makes things worse.

So, Indonesia needs to do like many other countries are doing, which is to stimulate the domestic economy. Indonesia has tremendous need for infrastructure, and infrastructure here is in terrible shape, roads, railway, ports, power. Also, there is a great need for housing.

So, you expand government investment, you build more roads, hire more people to build roads, build ports, so you give them an income.

But when the government increases spending, there are risks too, aren't there? Like the danger of inflation, for example.

If you had expanded your deficit two years ago, it would have been a great danger for inflation. Now, it's much less because the economy is slowing down, the world is slowing down. Prices of almost everything are going down. Even though the rupiah is depreciating, you still pay less because the prices are going down.

How big is the danger to rupiah?

There is a danger, there is a risk that the rupiah will depreciate further. That's the reason you need to expand exports. The more exports you have, the more income you have from exports, and the stronger the rupiah. Also, you need to expand exports to put more people in work.

But suppose that even then, you can't raise exports quickly, and the rupiah goes down — actually, it has some advantages both for exporters and for people who produce in Indonesia. They become more competitive.

But the danger is that the prices of goods for poor people and consumers will go up. If the price of automobiles goes up, this is a problem you should not about worry so much, but you must worry when poor people consume less. For now, it's not a problem because world prices are going down, but when prices start to go up and the rupiah continues to depreciate, then you need to give subsidies to poor people.

What is the best way for the government to help the poor, but at the same time create employment for them?

Looking at the existing government programs, I would suggest the community-based PNPM (Mandiri Community Empowerment Program). They are constructing infrastructure in all kecamatan (districts) all over Indonesia.

They pay a relatively low wage, say, equal with the agricultural wage of about Rp 20,000 a day.

It is supposed to create employment for 60 days. So, Rp 20,000 times 60 days, people get Rp 1.2 million in total, and that's during the season when there is very little work in agriculture.

They are getting Rp 1.2 million, so they can afford to buy more. That's much better than a direct cash transfer. A direct transfer is better than doing nothing, but with that, you increase their spending, but you don't increase the productivity of the economy. The moment it stops, the benefit stops, so you have to keep giving them money.

When you build the village roads, people first get income from building the roads, and suddenly, they can grow more vegetables and sell them to the market because of the better roads. So, better spend the money on something productive like this.

You seem to recommend funding more PNPMs. Why and how?

Yes. First of all, much less of the money is stolen. Normally, the money goes to the ministry of finance, and then to individual ministries, and then goes from there to the province, and then to the kabupaten (regency), from the kabupaten to the kecamatan. Supposed only one of these is corrupt, it's already reducing the amount. But really, all of them are corrupt. A lot of money has disappeared.

But for PNPMs, this money goes directly to the PNPM committee at the kecamatan through Bank Rakyat Indonesia. There could still be people who are corrupt there, but it's only one level.

Secondly, the money gets spent immediately. You know, there is a big problem with government spending: Most of the money doesn't get spent until the last quarter, and worse, it's not spent wisely, but quickly.

My big recommendation is not the things I said, but this: They need to have a group of people who are working on this program and come up with a workout program. And put people whom you trust. I think they could put together a team of people the government trust. (The Jakarta Post)

V. EDITORIAL :

1. Ganti Pemimpin Lagi di Thailand

PM Thailand Somchai Wongsawat akhirnya mundur dari jabatannya, Selasa (2/12), setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan membubarkan tiga partai politik utama yang saat ini menguasai parlemen karena dianggap berbuat curang dalam pemilihan umum pada Desember 2007 lalu. Somchai sendiri adalah pejabat yang menggantikan PM Samak Sundaravej, yang mundur pada 9 September 2008, karena dianggap bersalah telah tampil di sebuah acara masak-memasak di televisi.

Apa yang terjadi di Thailand kemarin adalah tuntutan peristiwa yang dipicu oleh terpilihnya Thaksin Sinawatra sebagai PM Thailand pada 9 September 2001, setelah partai yang dipimpinnya, Thai Rak Thai, memenangkan pemilihan umum. Kemenangan Thaksin itu sedikit demi sedikit mengubah budaya dan struktur politik di negeri gajah putih ini, karena untuk pertama kalinya seorang pemimpin populis menjalankan roda pemerintahan. Kepemimpinan Thaksin menyingkirkan peran kaum elite tradisional yang selama ini menikmati keistimewaan dalam struktur sosial politik.

Thaksin pun memanfaatkan peluang ini dengan baik, dia berhasil membangun Thailand, dan mengangkat perekonomian di kawasan pedesaan, yang cukup terpuak akibat krisis 1997. Itu sebabnya dia dicintai rakyat kecil. Namun, Thaksin juga dikenal sebagai pemimpin yang tega bertindak keras terhadap rakyat. (Sinar Harapan)

2. Menjadi Produsen Biodiesel

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia, saat ini, adalah mengantisipasi menipisnya cadangan sumber energi tradisional, seperti minyak dan gas, serta sesegera mungkin mengembangkan sumber energi alternatif secara massal. Peralihan, minyak dan gas bersumber dari yang tak terbarukan, sehingga suatu saat akan habis.

Kesadaran untuk mengupayakan sumber energi terbarukan sudah lama muncul di seluruh dunia. Banyak negara secara intensif mengembangkan sumber energi alternatif dengan memanfaatkan tanaman untuk menghasilkan bahan bakar hayati nonfosil atau bahan bakar nabati (BBN).

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Indonesia bakal menjadi produsen utama biodiesel di dunia. Tingkat produksi, saat ini, 2 juta kiloliter per tahun, akan meningkat menjadi 5 juta kiloliter per tahun.

Optimisme pemerintah didasari fakta banyaknya tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pengembangan BBN. Salah satu di antaranya adalah kelapa sawit, di mana Indonesia adalah produsen terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Kondisi harga minyak kelapa sawit di pasar internasional, yang anjlok akhir-akhir ini, mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi kelapa sawit. Kelebihan itu tentu akan lebih bermanfaat bila dialihkan sebagai BBN. Selain nilai ekonominya meningkat, juga akan membantu menstabilkan harga minyak kelapa sawit di dunia.

Pemerintah mulai menyiapkan perangkat pendukung untuk dapat mengembangkan biodiesel secara massal ke depan. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan bahwa pemakaian BBN ditargetkan mencapai 5 persen pada 2025. Target tersebut cukup strategis, mengingat cadangan minyak bumi nasional, yang diperkirakan 9 miliar barel, diperkirakan habis dalam 20 tahun mendatang, dengan asumsi produksi minyak bumi rata-rata 1 juta barel per hari. Kondisi yang sama diyakini akan terjadi pada gas dan batu bara, yang lambat laun akan habis.

Oleh karena itu, klaim Menteri Purnomo bahwa kita bisa tampil sebagai produsen utama biodiesel di dunia, tentu bukanlah isapan jempol belaka. Namun, tentu bukan perkara gampang untuk mewujudkannya.

Tak bisa dimungkiri, salah satu kendala dalam mengimplementasikan pengembangan BBN justru terletak pada pemerintah sendiri. Contohnya, keberpihakan pemerintah terhadap bahan bakar fosil begitu dominan, yang ditandai dengan masih adanya subsidi harga untuk bahan bakar minyak (BBM).

Terlepas bahwa subsidi itu dianggap masih diperlukan untuk menopang kebutuhan masyarakat, kita juga harus menyadari bahwa hal itu mengakibatkan pola konsumsi sumber energi masyarakat masih sangat bergantung pada sumber energi fosil yang tak terbarukan.

Salah satu cara agar BBN dapat diproduksi secara massal dan perlahan-lahan mengisi kehidupan masyarakat adalah memberikan insentif agar pengembangan tanaman untuk itu bernilai ekonomis. Pada saat yang bersamaan, pemerintah memberikan disinsentif penggunaan BBM, berupa pencabutan subsidi.

Bila itu dilakukan simultan, diyakini biodiesel dapat dikembangkan. Pada gilirannya, seluruh infrastruktur yang mendukung produksi, pemasaran, dan penggunaan biodiesel akan tumbuh dengan sendirinya.

3. Babak Baru Politik Thailand

Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat menyatakan mundur setelah dia dan 59 politisi dilarang berpolitik, termasuk tiga partai koalisi yang memerintah dinyatakan bubar, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hal itu, Selasa 2 Desember 2008. PM Somchai menjabat awal September 2008, ketika MK menyatakan pendahulunya, PM Samak Sundaravej, bersalah. PM Samak masih muncul dalam iklan memasak di televisi, yang artinya berpenghasilan tambahan, selain sebagai PM Thailand. Keputusan MK yang menyebabkan Somchai mundur adalah di luar dugaan.

Dampaknya, untuk sementara bisa menghentikan konfrontasi politik antara pemerintah dan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Putusan membubarkan tiga partai koalisi itu, karena mempraktikkan jual beli suara pada Pemilu Desember 2007. PM Somchai dan 59 politisi dilarang berpolitik selama lima tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand itu adalah hal luar biasa dan tidak terduga sebelumnya. Pada saat terjadi stagnasi politik, karena oposisi PAD mengepung kantor pemerintah, gedung parlemen, dan dua bandara, maka harapan menenangkan situasi hanya berada pada dua pihak, yakni Raja Bhumibol Adulyadej dan militer. Namun, militer yang biasanya tampil menengahi bila terjadi stagnasi politik, kini mengambil jarak dan Panglima AB Jenderal Anupong sudah menyatakan netral, tidak akan mengintervensi. Sedangkan Raja Bhumibol Adulyadej, penguasa monarki konstitusional, sejak konflik politik mengeras 26 Agustus 2008, tampak berdiam diri.

Sebelumnya, muncul spekulasi bahwa monarki bersimpati kepada para demonstran, karena ketika seorang wanita pemrotes tewas, Ratu Sarikit tampil berbelasungkawa. Bagaimanapun sejak 26 Agustus sampai 2 Desember 2008, konflik politik Thailand menghambat kinerja ekonomi. Devisa hasil pariwisata Thailand merosot karena menurunnya kunjungan wisatawan. Sejak dua bandara utama, Suvarnabhumi dan Don Muang, diduduki pemrotes, Thailand kehilangan rata-rata US\$ 14 juta atau sekitar Rp 12 miliar per hari. Belum lagi dampak berantainya.

Logis, karena Suvarnabhumi pada 2007 mengelola hampir 262.000 penerbangan komersial dengan 41 juta penumpang dan 1,2 juta ton kargo. Kini, penerbangan harus dialihkan ke Bandara Phuket atau Chiang Mai, yang jauh di selatan (8-9 jam berkendara darat).

Thailand harus memulai babak baru politik setelah Somchai mundur, tiga partai koalisi berkuasa dibubarkan, dan 59 politisi dilarang berpolitik selama lima tahun. Meskipun masih pertanyaan, namun parlemen dan Raja Bhumibol bisa sepakat memilih Pejabat PM untuk menjalankan pemerintahan. Masalahnya, tokoh baru dipastikan bukan lagi pro-Thaksin agar PAD berhenti berdemonstrasi.

Diperlukan pembaruan politik total. Selain keputusan Raja Bhumibol, parlemen tanpa tiga partai tentu sulit menetapkan PM definitif yang bukan pro-Thaksin. Parlemen harus memilih PM dalam 30 hari, atau menetapkan Deputy PM Chaowarat Chandeerakul.

Kalaupun diselenggarakan pemilu, mayoritas rakyat, khususnya para petani yang masih menggandrungi partai-partai pro-Thaksin Shinawatra, belum tentu mau beralih. Rekonsiliasi dan normalisasi politik, serta demokrasi di Thailand masih jauh. Untuk itu, diperlukan terobosan baru. (Suara Pembaruan)

Jakarta, 4 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu